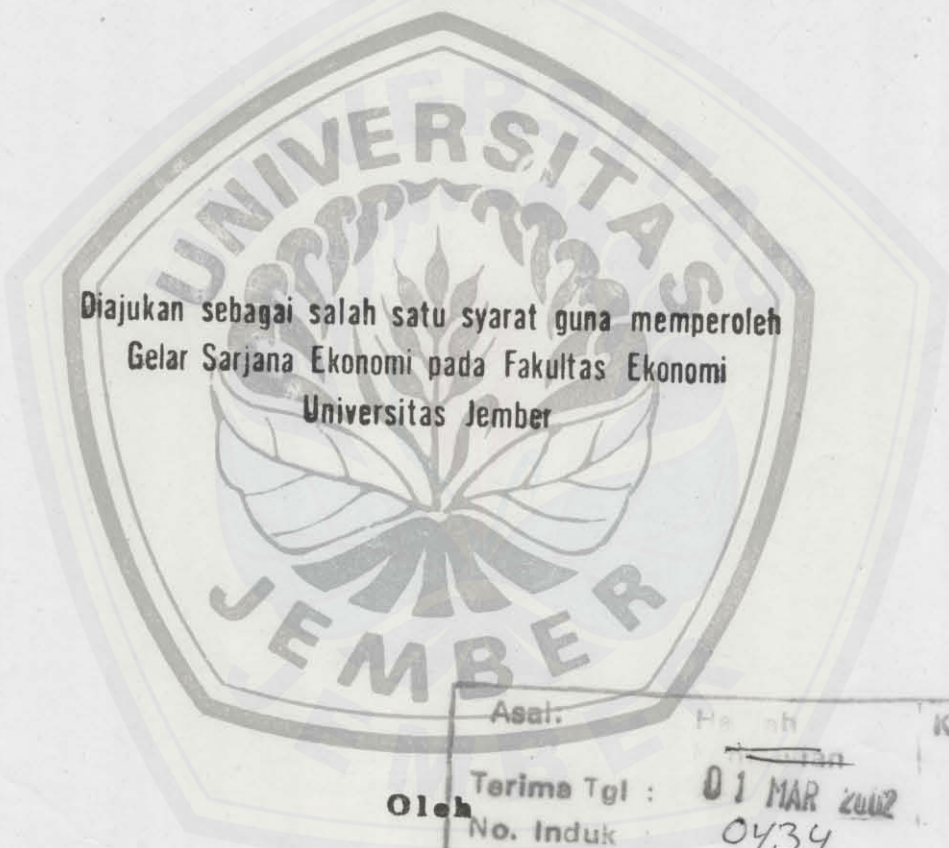




ANALISIS DESKRIPTIF PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI GUNA PENINGKATAN
SUMBANGAN TERHADAP PDRB KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh

Funaidy
NIM, DIA195084

Asal:	Revisi	Klass
Terima Tgl :	01 MAR 2002	330.9
No. Induk :	0434	JUN
KLASIR / PENYALIN :	Man	9

S
C-1

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2002

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS DESKRIPTIF PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI GUNA
PENINGKATAN SUMBANGAN TERHADAP PDRB KABUPATEN JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : JUNAIDY

N. I. M. : DIAI95084

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

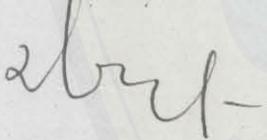
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

01 FEBRUARI 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,



Prof. Dr. H. Harijono, SU

NIP.130 350 765

Sekretaris,



Drs. Badjuri, ME

NIP.131 086 652

Anggota,



Drs. Zainuri, M.Si

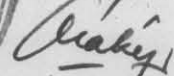
NIP.131 832 336

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,



Drs. H. Liakip, SU

NIP.130 531 976



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Deskriptif Pengembangan Sektor
Ekonomi Guna Peningkatan Sumbangan
Terhadap PDRB Kabupaten Jember

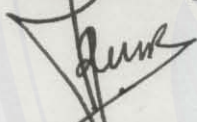
Nama Mahasiswa : Junaidy

N I M : D1A195-084

Jurusan : I E S P

Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri

Pembimbing I



Drs. Zainuri, MSi

131 832 336

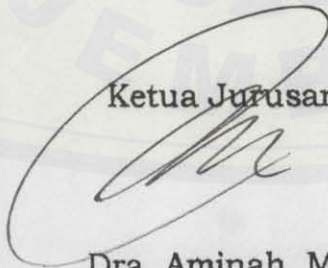
Pembimbing II



Teguh Hadi Priyono, SE, MSi

132 092 300

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM

130 676 291

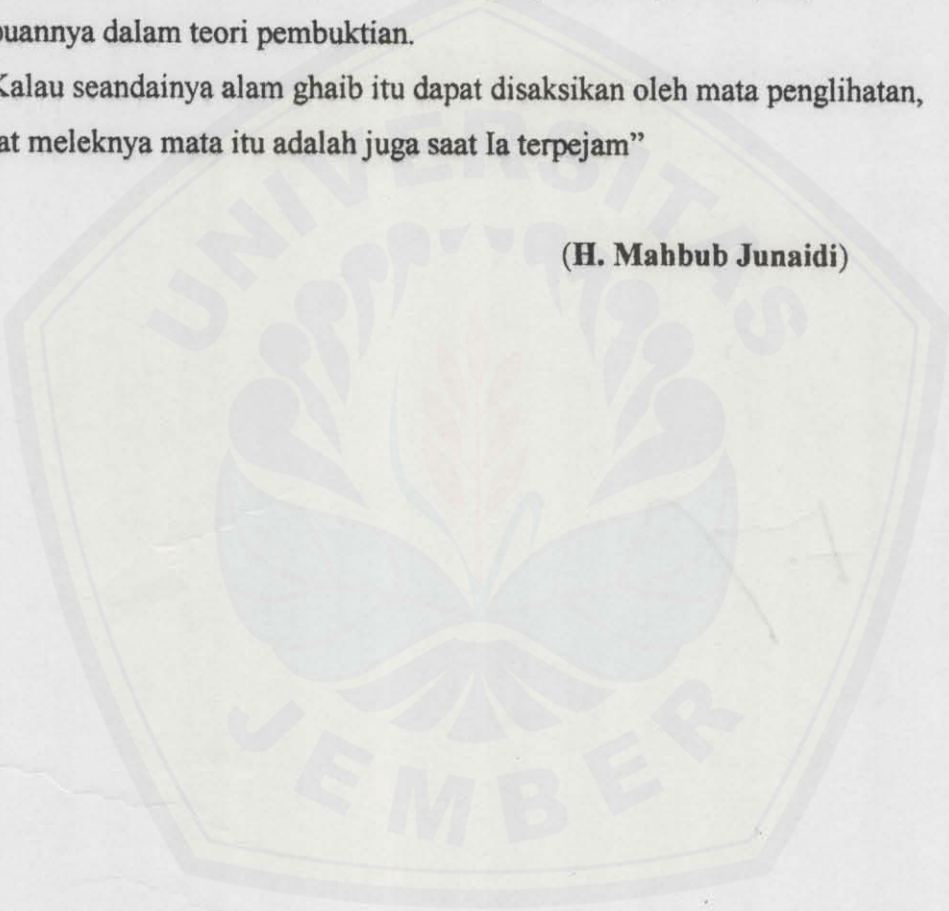
Tanggal Persetujuan : Januari 2002

MOTTO

“Jika Matahari ilmu telah terbenam, maka bingunglah akal pikiran yang kemampuannya dalam teori pembuktian.

Kalau seandainya alam ghaib itu dapat disaksikan oleh mata penglihatan, maka saat meleknya mata itu adalah juga saat Ia terpejam”

(H. Mahbub Junaidi)



Kupersembahkan skripsi ini kepada

Kyaiku, Abahku **Mohammad Badar Abbas** yang memberikan sebuah keyakinan
hidup dunia akhirat

Kedua orang tuaku **Panan Al Poniran dan Sumiyati** yang telah melindungi
dalam belaian kasih sayangnya

Elok Elita Rahmawati
yang selalu menemani dalam kedukaan dan keceriaan.

Qurrotul 'Uyun
Pelita di kala kegelapan akan menggelayut dalam jiwaku.

Sugeng Hariyono, Astutik, Lilik Juwariyah, Puji Rahayu, Erliya
Kapan kita bisa bercanda, berdebat, dalam biduk keluarga besar Al Poniran

Mbak Nining, Sundoyo, Hani Nur Mutiara, Rizki, Kiki,
Selamat datang di perahu besar Kami

Almamaterku
Candradimuka ilmu-ilmu ekonomi

Sahabat Pergerakanku
yang memberikan dasar-dasar perjuangan terhadap masyarakat

ABSTRAKSI

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proporsi laju pertumbuhan sektor ekonomi terhadap laju pertumbuhan PDRB dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Jember di masa mendatang dan total keuntungan yang diperoleh Kabupaten Jember dari perbedaan keunggulan faktor lokasional dan struktural.

Dari hasil penghitungan LQ dinamic menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air minum, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa lebih besar dari satu sehingga proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap laju pertumbuhan sektor yang sama di Kabupaten Jember lebih unggul di dibandingkan dengan sektor yang sama di Propinsi Jawa Timur.

Sektor unggulan daerah sekarang ini kecuali subsektor tanaman perkebunan nampaknya masih dapat dipertahankan untuk masa mendatang. Bahkan ada empat sektor lain mungkin dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan di masa mendatang, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan serta sektor listrik, gas dan air bersih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Skripsi ini bertujuan mengetahui proporsi laju pertumbuhan sektor ekonomi yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 1995-1999 dan laju pertumbuhan sektor ekonomi tersebut dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Jember

Penulis menyadari bahwa proses penyempurnaan skripsi ini telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. Zainuri, Msi. dan Teguh Hadi Priyono, SE, Msi. Selaku dosen pembimbing I dan II yang telah bersedia menyediakan waktu untuk memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. Haryono, SU dan Drs. Badjuri, Msi. Selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmunya dalam proses penelaahan dan penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Ibu Dra. Aminah, MM dan Bapak Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes yang memberikan masukan berharga bagi penulisan skripsi ini.
5. Heriyanto, SE dan Tri Pitono, SE mewakili angkatan '96 yang selalu kritis
6. Jayin Khuzaini, SE dan Devi Karmilasari Sahabat perjuangan yang selalu memberikan nasehat berharga dalam pergulatan panjang kehidupan
7. H.Winarto Hadi Siswoyo dan Irma Wahyudina semoga ibadah haji tahun ini menjadi sesuatu yang bernilai.
8. Sahabat Halmahera 121, Moh. Halim Fawazi, Pipit, Kholis dan Indah damailah selalu disana
9. Sahabat diskusi "sufi", Kyai Didit Kurniawan, Haris Balady, Abdul Karim.

10. Hendratno pengantar musik belajarku yang selalu memberikan mozaik indah
11. Guruku teknologi komputer modern Gus Halimy, Asep Syaifullah aksesmu selalu aku tunggu.
12. Korps yang memberikan segala ide tentang kesetaraan gender Rukmiyati, Tri Astutik, A'yun, Atik, Irma.
13. Sahabat yang selalu memberikan pemikiran untuk teknologi transportasi Dedi Novianto, Iqbal Munazah
14. Sahabatku Imam Sutanto, Ibnu Arfan Iswanto jaga selalu kesehatanmu untuk diskusi malam hari.
15. Sahabat- sahabat pergerakan yang selalu intens dalam pembahasan isu-isu aktual ekonomi Indonesia

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember., Januari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya	6
2.2 Landasan Teori	6
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	20
3.2 Metode Pengumpulan Data	20
3.3 Metode Analisis Data	20
3.4 Definisi Variabel Operasional.....	24

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

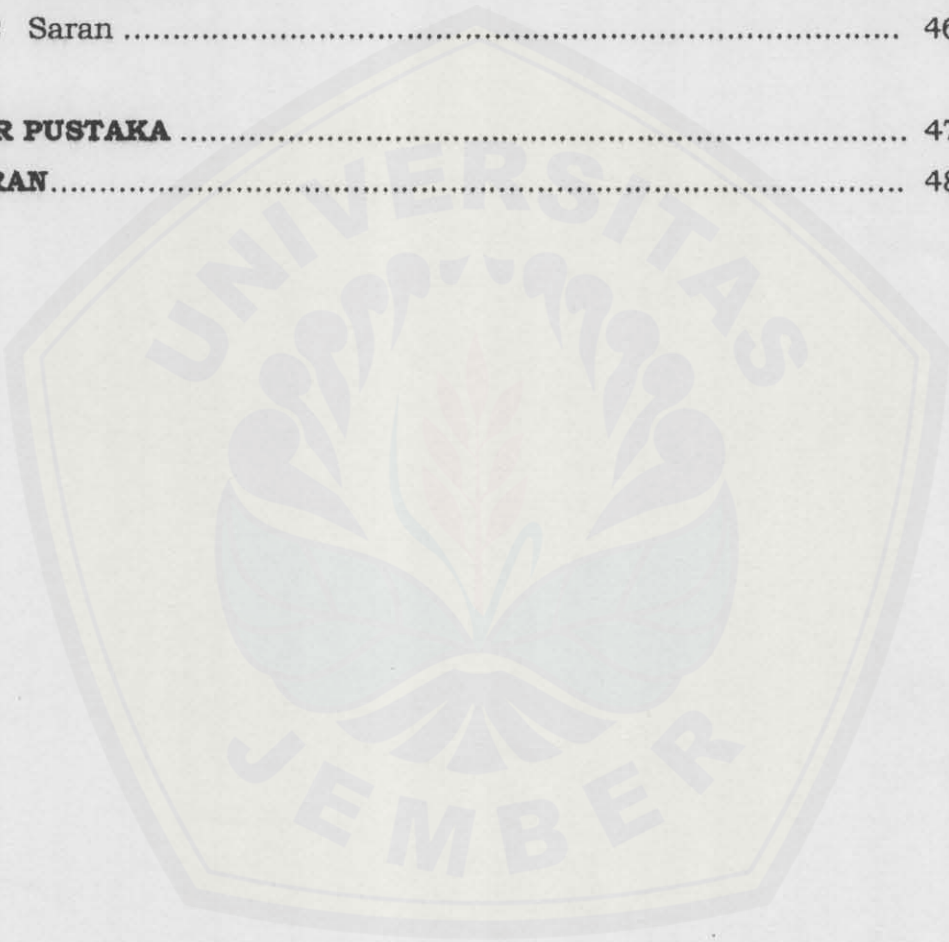
4.1	Gambaran Umum Daerah Penelitian	26
4.2	Hasil dan Pembahasan	34

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	45
5.2	Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	47
-----------------------------	----

LAMPIRAN	48
-----------------------	----

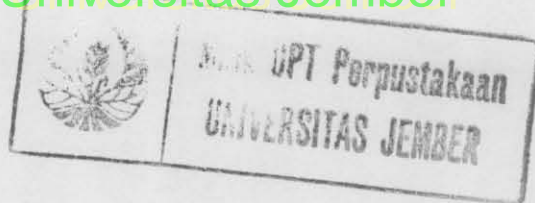


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Besar Dana Untuk Daerah Menurut Sumber Penerimaan.....	19
2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jember 1996-2000.....	25
3. Kepadatan Penduduk Kabupaten Jember	27
4. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga	
5. Konstan Th.2000 Kabupaten Jember	28
6. Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Usaha	
Tahun 2000.....	29
7. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Atas	
Dasar Harga Konstan Tahun 1995-1999.....	30
7. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga	
Konstan 2000 Tahun 1995-1999	32
8. Pendapatan Asli Daerah Tahun 1990/1991-1999/2000	33
9. Hasil Location Quotient dan Shift Share Terhadap	
Propinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha	
Tahun 1995-1999.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Produk Domestik Bruto Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995-1999	47
2. Location Quotient Masing-Masing sektor Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jember Th 1995-1999	48
3. Dinamic Location Quotient Quotient Masing-Masing Sektor Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jember Th 1996-1999	49
4. Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995-1999	50
5. Pertumbuhan Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1996-1999 Jawa Timur	51
6. Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995-1999	52
7. Kontribusi Sektoral PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1995-1999	53



I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kebijaksanaan pembangunan lima tahunan ditegaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota dan desa, antar sektor serta pembukaan dan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya, yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air (Dirjen Dikti Depdikbud RI, 1993:116).

Pembangunan regional adalah bagian dari pembangunan nasional. Munculnya masalah-masalah pembangunan regional terjadi karena adanya keterbatasan potensi sumber-sumber yang ada, penyebaran sumber-sumber yang tidak merata serta jumlah penduduk yang semakin bertambah. Berkaitan dengan hal tersebut maka kebutuhan akan pengamatan regional yang cermat dan menyeluruh semakin terasa agar kebijaksanaan pembangunan untuk masing-masing wilayah dapat ditentukan secara lebih tepat, terarah, dan sesuai dengan potensi pembangunan yang terdapat pada masing-masing wilayah (Nursyaman, 1996 : 239). Oleh sebab itu perlu disusun suatu perencanaan yang terkoordinir baik dalam tujuan-tujuannya maupun dalam peralatan kebijaksanaannya yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Hal itu untuk menghindari inkonsistensi dalam suatu perencanaan pembangunan regional.

Perencanaan pembangunan regional adalah suatu program strategi pemerintah dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya proses

pembangunan daerah-daerah sebagai bagian dari nasional, supaya terjadi perkembangan kearah tujuan yang dikehendaki.

Tujuan-tujuan tersebut menurut Kadariyah (1972: 3) adalah:

- a. mencapai kenaikan pendapatan perkapita cepat,
- b. menyediakan kesempatan kerja yang cukup,
- c. mengadakan redistribusi pendapatan supaya lebih merata,
- d. mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan suatu pembangunan dan kemakmuran antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.
- e. mengubah struktur perekonomian agar tidak berat sebelah.

Masing-masing tujuan tersebut penting, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dalam perencanaan perlu ditentukan prioritas tujuan sesuai dengan karakteristik dan keadaan suatu daerah. Tujuan perencanaan suatu daerah adalah suatu perencanaan yang mempunyai ciri-ciri ekonomi sosial, serta mempertimbangkan aspek fisik lingkungan.

Penyusunan rencana regional ditiap-tiap sektor (pertanian, industri, prasarana dan jasa) harus ditetapkan sasaran dan target pembangunan tanpa harus menunggu suatu regional plan. Setiap sektor memulai penyusunan rencananya di sektor masing-masing dimana suatu rencana yang demikian merupakan hasil konsultasi yang terus menerus antar perencanaan sektoral dan regional. Konsultasi itu dapat dirumuskan dan disempurnakan tujuan-tujuan dari sasaran pembangunan.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam pembangunan nasional adalah pembangunan daerah. Jawa Timur sebagai salah satu propinsi di Indonesia pertumbuhan ekonominya pada tahun 1999 dan tahun 2000 adalah 0,05 % dan 1,03%. Pada tahun 1998 perekonomian Jawa Timur mengalami kontraksi hingga 16,22 % karena adanya krisis moneter yang melanda negara Indonesia. Dengan demikian keberhasilan pembangunan di Jawa Timur akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan di Jawa Timur nantinya juga dipengaruhi oleh pembangunan sektor dan pembangunan regional di masing-masing kabupaten atau kotamadya (BPS Propinsi Jawa Timur, 1999:425).

Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, pada tahun 1999 memiliki potensi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05 %. Angka ini berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar -5,88% dengan menggunakan tahun dasar 1995. Keberhasilan Jember mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut diatas disebabkan kesungguhan Jember dalam meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor nonmigas seperti anjuran pemerintah pusat. Sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar bagi pembentukan PDRB total yaitu 33,10 % dan angka tersebut bertahan sampai dengan tahun 2000.

Sektor-sektor ekonomi yang mengalami kenaikan mengesankan dalam tahun 1999 sektor listrik, gas dan air bersih, dimana sektor ini meraih kenaikan 14,40 %. Tiga sektor utama yang paling berpengaruh terhadap total PDRB ialah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Peranan gabungan dari ketiga sektor ini saja mampu mendominasi sekitar 16,97 % terhadap total PDRB, oleh sebab itu, tingkat pertumbuhan yang terjadi pada sektor utama ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. PDRB per kapita yang pada tahun 1999 sebesar Rp 1.020,11 itu naik menjadi Rp 1.050,29 di tahun 2000 atau naik sebesar 1,02 % (BPS Kabupaten Jember, 2000:36).

1.2 Perumusan Masalah

Berkaitan dengan kebutuhan akan pembangunan regional yang cermat dan menyeluruh, maka perlu adanya suatu kebijaksanaan yang mendukung dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi yang terbatas agar kebijaksanaan pembangunan untuk masing-masing wilayah dapat ditentukan secara tepat, terarah dan sesuai dengan potensi pembangunan yang terdapat pada masing-masing wilayah. Peranan sektor ekonomi sangat besar dalam suatu daerah. Kabupaten Jember secara potensial mempunyai sektor pertanian yang paling besar dan paling stabil. Sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar bagi pembentukan PDRB total yaitu

44,82% pada tahun 1999 dibandingkan sektor jasa-jasa,, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Namun sektor pertanian belum tentu menjadi sektor unggulan pada tahun yang akan datang. Reposisi demikian dapat terjadi tergantung pada laju pertumbuhan setiap sektor ekonomi Kabupaten Jember dibandingkan laju pertumbuhan sektor pertanian di Jawa Timur. Maka dari itu perlu adanya kebijaksanaan yang terarah bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya penelitian tentang :

1. bagaimana proporsi laju pertumbuhan sektor ekonomi terhadap laju pertumbuhan PDRB dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Jember di masa mendatang;
2. berapa besar total keuntungan yang diperoleh Kabupaten Jember dari perbedaan keunggulan faktor lokasional dan faktor struktural.

1.3 Tujuan Penelitian

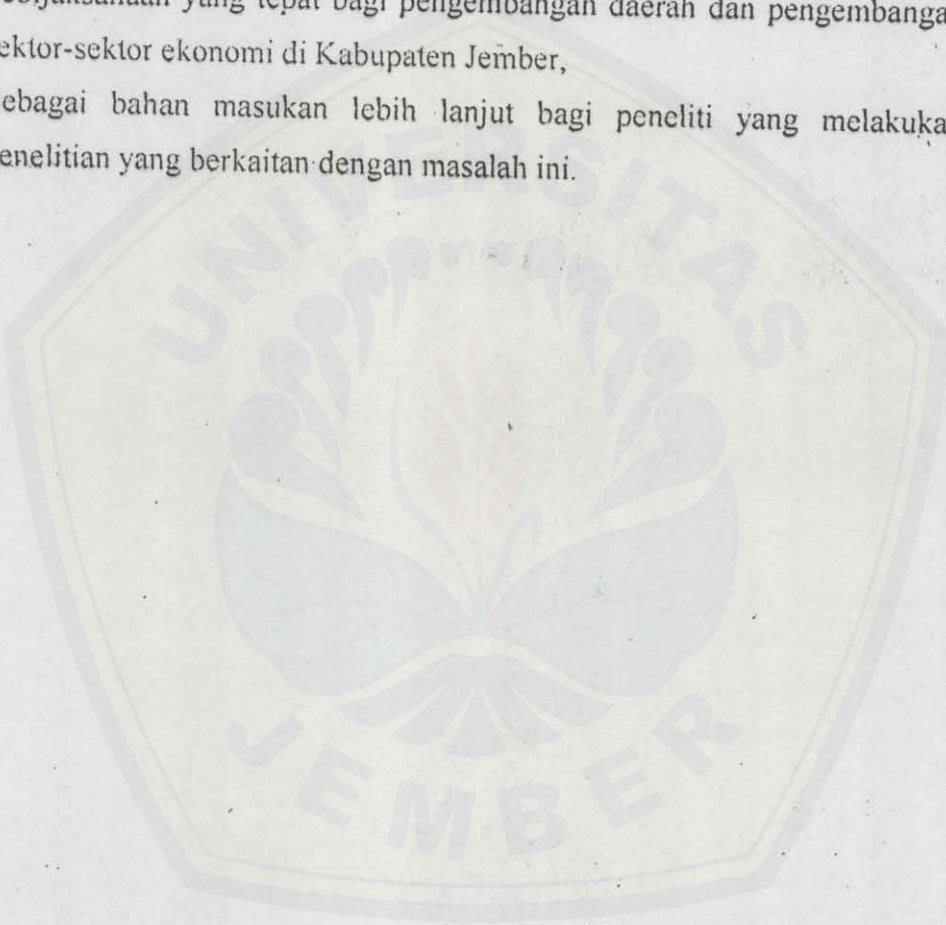
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

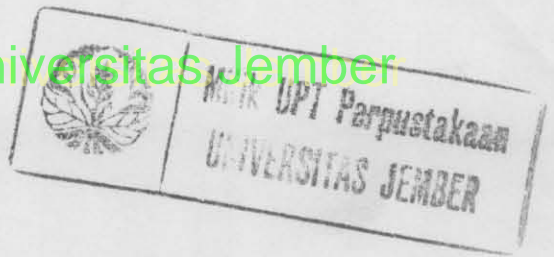
1. proporsi laju pertumbuhan sektor ekonomi terhadap laju pertumbuhan PDRB dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 1995—1999;
2. total keuntungan yang diperoleh Kabupaten Jember dari perbedaan keunggulan faktor lokasional dan faktor struktural.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

1. sebagai bahan informasi bagi pihak pemerintah daerah dalam menentukan kebijaksanaan yang tepat bagi pengembangan daerah dan pengembangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Jember,
2. Sebagai bahan masukan lebih lanjut bagi peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.





II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.

Pada perekonomian Kabupaten Jember terlihat pentingnya sektor prioritas dalam suatu perencanaan regional sebab peningkatan nilai tambah pada sektor prioritas selain meningkatkan PDRB daerah juga meningkatkan nilai tambah pada sektor non prioritas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rahmawati (1998:26) terhadap potensi ekonomi Kabupaten Jember terdapat tiga sektor basis yang memiliki nilai $LQ > 1$. Ketiga sektor tersebut berdasarkan urutannya adalah pertanian; sektor jasa-jasa; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Namun dari ketiga sektor tersebut, sektor pertanianlah yang paling besar dan paling stabil nilai LQ-nya selama 4 tahun (1993-1996) yaitu sebesar 2,25 dibandingkan dengan sektor jasa—jasa dan sektor keuangan, persewaan serta jasa persewaan sebesar 1,02 dan 1,04. Sektor pertanian juga memiliki angka koefisien pergeseran (CR) positif sebesar 0,0362. Sehingga sektor pertanian memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Menurut hasil penelitian Widodo (1999:44) dalam perekonomian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sektor yang menjadi tulang punggung, yaitu sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis karena memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian dan merupakan sektor basis. Dengan analisis LQ membuktikan bahwa industri pengolahan di Jawa Timur menduduki potensi sebagai basis ekonomi dengan nilai LQ antara 1,2995 sampai 1,3001 yang berarti merupakan sektor basis.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pembangunan Wilayah

Pembangunan hakekatnya merupakan usaha untuk menyediakan lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang

paling humanistik. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa pembangunan bukan untuk satu golongan masyarakat tetapi seluruh masyarakat, dan pembangunan bukan pada segi fisiknya saja tetapi juga mental spiritual. Pembangunan juga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) tetapi juga distribusi pendapatan (*income distribution*), seperti dinyatakan dalam trilogi pembangunan.

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan tersebut, Blakely (1994) menyatakan bahwa pemerintah pusat (nasional) harus membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan wilayah (*region*) dan daerah (*localities*) dengan melaksanakan strategi pembangunan yang akan memperkuat keunggulan kompetitif wilayah (*region competitive advantage*). Dalam kerangka inilah maka pembangunan wilayah harus dipahami sebagai pelaksanaan pembangunan nasional di suatu wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial dari wilayah tersebut dengan tetap berpedoman pada tujuan nasional.

Pembangunan nasional yang tidak memperhatikan pada pembangunan wilayah akan mengakibatkan perkembangan yang tidak merata antar wilayah, yang akhirnya akan mengarah pada kesenjangan, Myrdal (1976) mengemukakan bahwa perkembangan yang tidak merata akan menimbulkan apa yang disebut dengan proses pencucian (*backwash effect*), di mana sumberdaya pada wilayah yang kurang maju akan mengalir ke wilayah yang lebih maju, yaitu pada pusat-pusat pertumbuhan. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi pembangunan wilayah yang kurang maju, karena sumber daya sudah tercuci oleh wilayah yang sudah maju. Sumberdaya yang tercuci tersebut umumnya merupakan sumberdaya yang relatif bermutu tinggi dan sangat dibutuhkan bagi pembangunan wilayah yang bersangkutan.

Konsep perencanaan wilayah mencoba untuk merumuskan kebijakan yang akan ditempuh agar kegiatan dan hasil pembangunan dapat disebarluaskan ke seluruh wilayah, dengan memanfaatkan potensi yang ada di suatu wilayah secara optimal. Pertumbuhan dan pemerataan dapat dioptimalkan, apabila perencanaan wilayah tetap memperhatikan aspek perencanaan sektoral dalam batas-batas tertentu. Hal ini menunjukkan konsep perencanaan wilayah diciptakan guna menunjang sistem

perencanaan sektoral, sehingga kebijakan pertumbuhan dan pemerataan akan dapat dirumuskan secara bersama-sama.

Pembangunan wilayah yang dilakukan melalui pendekatan potensi wilayah akan mengarah pada spesialisasi. Dengan spesialisasi akan mengakibatkan efisiensi pengalokasian sumberdaya dan berkembangnya perdagangan antar wilayah. Selanjutnya dengan berkembangnya perdagangan antar wilayah dan peningkatan efisiensi alokasi sumberdaya akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional.

2.2.2 Teori Kutub Pertumbuhan

Teori kutub pertumbuhan bersumber pada faktor-faktor aglomerasi (pengelompokan) dari teori-teori lokasi industri. Menurut pendapat ahli ekonomi Perroux (1964:92) dinyatakan bahwa fakta dasar dari perkembangan sosial sebagaimana halnya dengan perkembangan industri adalah sebagai berikut :

“pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah, lalu pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek atau pengaruh yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian “

lebih spesifik lagi Budiharsono (1989:58) mendefinisikan kutub pertumbuhan sebagai berikut :

“sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya”

Teori kutub pertumbuhan regional ini sangat populer dan menjadi suatu gagasan yang digunakan dimana-mana karena disamping digunakan untuk memahami struktur regional, teori ini juga merupakan suatu metode untuk memprediksikan perubahan-perubahan struktur tersebut dan juga untuk merumuskan pemecahan berbagai persoalan regional tertentu.

Dalam membicarakan teori kutub pertumbuhan, maka konsep ekonomi dasar yang harus dipenuhi menurut Budiharsono (1989:24) adalah :

1. konsep *leading industries* dan perusahaan-perusahaan *propulsif*
2. konsep polarisasi
3. konsep *spread effects* dan *trickling down effects*

Berkaitan dengan pentingnya sektor pemimpin (sektor yang mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor lainnya) untuk memacu pertumbuhan, maka selanjutnya pembahasan hanya ditekankan pada konsep *leading industries* dan perusahaan-perusahaan *propulsif*, karena pada konsep *leading industries* dan perusahaan-perusahaan *propulsif* dinyatakan bahwa pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan *propulsif* yang besar, yang termasuk dalam *leading industries* yang mendominasi unit-unit ekonomi lainnya. Ciri-ciri dari *leading industries* adalah sebagai berikut :

1. industri relatif baru dan dinamis, serta mempunyai teknologi relatif tinggi,
2. permintaan terhadap produksinya mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi,
3. mempunyai keterkaitan antar sektor (kaitan ke depan dan kebelakang)

Ciri-ciri dari perusahaan *propulsif* adalah :

1. perusahaan tersebut relatif besar,
2. dapat menimbulkan dorongan-dorongan pertumbuhan yang nyata kepada lingkungan,
3. mempunyai kemampuan berinovasi yang tinggi,
4. perusahaan termasuk dalam suatu industri yang sedang timbul dengan cepat.

Dengan menganalisa beberapa ciri tersebut, maka *leading industries* dan perusahaan *propulsif* dapat diidentifikasi, walaupun kebanyakan kutub pertumbuhan tersebut mempunyai *leading industries* tetapi tidak semua industri seperti itu akan menimbulkan kutub pertumbuhan, hal ini dikarenakan adanya keuntungan-keuntungan eksternal yang jauh lebih besar di daerah-daerah lain.

Teori kutub pertumbuhan juga merupakan sarana kebijaksanaan, karena (Budiharsono, 1989:24) :

1. dari segi berbagai macam keuntungan aglomerasi (pengelompokan), teori ini cenderung untuk menjadi suatu cara yang sangat efisien untuk menimbulkan perkembangan,
2. dari segi anggaran belanja negara, pemusatan investasi pada titik-titik pertumbuhan tertentu adalah lebih murah dampak pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah-daerah yang besar,
3. *spread effect* yang ditimbulkan oleh titik pertumbuhan akan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh daerah-daerah yang sedang merosot.

2.2.3 Analisis Pengganda Basis (Base Multiplier)

Menurut konsep ekonomi basis wilayah, pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah terjadi karena adanya efek pengganda dari pembelanjaan kembali pendapatan yang diperoleh melalui penjualan barang dan jasa yang dihasilkan wilayah itu yang dipasarkan keluar wilayah. Besarnya kekuatan efek pengganda tersebut yang mendorong pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh koefisien pengganda yang dihasilkannya.

Masalah paling mendasar pada model ekonomi basis adalah masalah *time-lag*. Hal ini diakui, bahwa pengganda basis (*base multiplier*) tidak berlangsung secara cepat, karena membutuhkan *time-lag* antara respon dari sektor basis terhadap permintaan luar wilayah dan respon dari sektor non-basis terhadap perubahan sektor basis. Untuk mengatasi hal tersebut diatasi dengan modifikasi LQ.

Pengganda berdasarkan waktu dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu pengganda jangka pendek dan pengganda jangka panjang. Pada pengganda jangka pendek pengaruh konsumsi lokal dan investasi lokal tidak diperhitungkan, sehingga koefisien yang dihasilkan akan lebih kecil daripada koefisien pengganda pendapatan jangka panjang..

Kabupaten Jember, dimana sektor pertanian mempunyai andil besar terhadap perekonomian wilayah tersebut. Untuk itu perlu mengetahui bagaimana pengaruh suatu komoditas apabila dikembangkan dengan menghitung pengganda yang ditimbulkan akibat investasi pada pengembangan komoditas tersebut.

2.2.4 Dynamic Location Quation

Salah satu alat analisis untuk menganalisis peranan sektor pembangunan dalam suatu daerah adalah dengan menggunakan *location quation* yaitu suatu indikator sederhana yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain. Dalam literatur pembangunan daerah disebutkan bahwa struktur perumusan LQ memberikan beberapa nilai sebagai berikut : 'bahwa sektor di suatu daerah yang mempunyai nilai LQ di atas satu merupakan sektor kuat, sehingga daerah yang bersangkutan secara potensial merupakan pengeksport produk sektor tersebut ke daerah lain. Sebaliknya suatu daerah merupakan pengimpor produk sektor tersebut dari daerah lain jika nilai LQ-nya di bawah satu' (Azis, 1994:244)

Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di suatu daerah yang dianalisis dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien dapat di gunakan satuan pendapatan, tenaga kerja, jumlah penduduk, luas tanah dan nilai tambah (Azis, 1994:245).

Kelemahan LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat statis yang hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Itu artinya sektor yang unggul pada tahun ini belum tentu unggul pada tahun yang akan datang. Sebaliknya bisa saja sektor yang belum unggul pada saat ini akan unggul di masa mendatang. Reposisi demikian dapat terjadi tergantung pada laju pertumbuhan setiap sektor di suatu daerah dibandingkan laju pertumbuhan sektor itu di daerah yang lebih luas.

Nilai laju pertumbuhan dapat positif dan dapat pula negatif. Sejauh nilai laju pertumbuhan seluruh sektor positif baik di suatu daerah maupun di daerah yang lebih luas, mengenai kaidah LQ masih dapat di terima nalar dengan pemahaman nilai satu artinya laju pertumbuhan sektor tertentu pada suatu daerah sama dengan laju pertumbuhan daerah-daerah lain di daerah yang lebih luas. Sedangkan jika LQ kurang dari satu berarti laju pertumbuhan sektor tersebut di suatu daerah lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut di daerah lain dalam daerah yang lebih luas. Begitu pula kalau LQ lebih dari satu artinya laju pertumbuhan sektor itu pada suatu daerah lebih pesat dibandingkan di daerah lain dalam daerah yang lebih luas. Persoalannya adalah bahwa laju pertumbuhan suatu sektor dapat bernilai positif pada suatu daerah akan menghasilkan LQ yang negatif jika laju pertumbuhan di daerah yang lebih luas negatif. Akibatnya dapat ditafsirkan sama dengan jika laju pertumbuhan suatu sektor yang bernilai negatif di suatu daerah sementara di daerah yang lebih luas bernilai positif yang juga menghasilkan LQ negatif juga LQ negatif. sebenarnya tidak dapat ditafsirkan karena batas minimum nilai LQ adalah nol.

Sebagai alternatif dapat di gunakan *dynaamic location quation*. Prinsip DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, hanya untuk mengintroduksikan laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t). Struktur perumusan DLQ memberikan beberapa nilai sebagai berikut : "bawa proporsi laju pertumbuhan suatu sektor terhadap laju pertumbuhan PDRB di suatu daerah yang mempunyai nilai DLQ di atas satu mengalami laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap PDRB di daerah yang lebih luas. Sebaliknya suatu daerah mengalami laju pertumbuhan suatu sektor terhadap PDRB lebih rendah dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor yang sama terhadap PDRB di daerah yang lebih luas" (Yuwono ,1999). Rumus inilah yang digunakan untuk meneliti sektor komoditi pertanian Kabupaten Jember .

2.2.5 Analisis Shif Share

Analisis shift share ini menganalisis perubahan berbagai indikator perubahan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja pada dua titik waktu. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa perubahan tenaga kerja / produksi suatu wilayah antara tahun dasar dengan tahun akhir analisis dibagi menjadi 3 komponen pertumbuhan : komponen pertumbuhan nasional (national growth component) disingkat PN, komponen pertumbuhan proporsional (proportional or industrial mix growth component) disingkat PP dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (regional share growth component) disingkat PPW.

Komponen pertumbuhan nasional adalah perubahan kesempatan kerja atau produksi suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan kesempatan kerja atau produksi nasional secara umum perubahan kebijakan ekonomi nasional atau perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor dan wilayah. Beberapa contoh dapat dikemukakan seperti devaluasi, kecenderungan inflasi, pengangguran dan kebijakan perpajakan. Bila diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik ekonomi antar sektor dan antar wilayah, maka akibat dari perubahan ini pada berbagai sektor dan wilayah kurang lebih sama dan setiap sektor dan wilayah akan berubah dan tumbuh dengan laju pertumbuhan nasional. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa sektor pertumbuhan lebih cepat dari sektor-sektor lainnya dan beberapa wilayah lebih maju daripada beberapa wilayah lainnya. Oleh karena itu perlu diidentifikasi penyebabnya dan mengukur perbedaan yang timbul dengan memisahkan komponen pertumbuhan nasional dengan pertumbuhan proporsional dan pertumbuhan pangsa wilayah.

Komponen pertumbuhan proporsional timbul karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dan ketersediaan bahan mentah perbedaan dalam kebijakan industri (misalnya kebijakan perpajakan, subsidi dan price support) dan perbedaan dalam struktur dan peragaan pasar.

Komponen pertumbuhan pangsa wilayah timbul karena peningkatan atau penurunan PDRB atau kesempatan kerja disuatu wilayah dibandingkan wilayah

lainnya. Cepat atau lambatnya suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya ditentukan oleh keunggulan komparatif, akses ke pasar, dukungan kelembagaan, prasarana sosial dan ekonomi serta kebijakan ekonomi regional pada wilayah tersebut. (Budiharsono,1991:61).

2.2.6 Produk Domestik Regional Bruto

Nilai tambah yang dihitung dari seluruh sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Jember apabila dijumlahkan akan membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam kaitannya dengan PDRB ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipahami, yaitu :

1. Pengertian dari PDRB

PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah (region) tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas dasar faktor produksi. Oleh karena itu PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu untuk menghasilkan pendapatan atau balas jasa kepada faktor-faktor yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tertentu.

2. Jenis-jenis PDRB

PDRB secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. PDRB atas dasar harga yang berlaku adalah harga semua agregat pendapatan yang dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai hasil produksi dan biaya antara maupun pada komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB;
- b. PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dasar adalah semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar. Karena

menggunakan harga tetap maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

3. Manfaat dan kegunaan PDRB

Perhitungan PDRB mempunyai manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak untuk itu dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu :

- a. mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian suatu daerah.
Artinya dari perhitungan PDRB dapat diketahui suatu daerah tersebut daerah pertanian, industri, perdagangan atau jasa. Dengan dasar perhitungan tersebut dapat pula diketahui arah perekonomian daerah bergerak dan lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu yang telah diambil sehingga mampu memberikan kesimpulan yang benar.
- b. membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu artinya dalam angka yang telah di catat menghitung PDRB merupakan penjumlahan angka-angka selama jangka waktu tertentu misalnya satu tahun, sehingga dapat membandingkan dari tahun ke tahun. Perbandingan ini dapat memberikan keterangan terjadinya kenaikan atau penurunan, terjadinya perubahan struktur ekonomi atau tidak dan lain-lain. Angka perbandingan dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam melaksanakan program-program selanjutnya.
- c. membandingkan perekonomian antar daerah. Penghitungan PDRB dapat digunakan untuk membantu merumuskan kebijaksanaan dalam menentukan program pembangunan daerahnya dengan daerah lain. perbandingan ini penting bagi suatu daerah karena dapat di ketahui tingkat kemajuan suatu daerah tersebut termasuk kriteria daerah maju atau daerah yang masih terbelakang.
- d. merumuskan kebijaksanaan pemerintah. Penghitungan PDRB dapat digunakan untuk membantu merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah. Dengan mengetahui besarnya PDRB dapat ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam proses pembangunan sebelumnya dan komposisinya pada tiap-

tiap sektor ekonomi. Dengan peningkatan pendapatan perkapita pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kebijaksanaan daerah dan penggunaan dana investasi.

4. Metode Penghitungan PDRB

Menurut Biro Pusat Statistik Kabupaten Jember (1999:119) pendapatan regional dapat dihitung melalui yaitu : (1) metode langsung (2) metode tidak langsung.. metode langsung adalah metode perhitungan dengan mempergunakan data daerah secara terpisah sama sekali dengan data nasional sehingga hasil perhitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut, sedangkan metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi yaitu dengan cara mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional dengan memakai berbagai macam indikator produksi sebagai alokator. Metode langsung dapat dilakukan dengan mempergunakan tiga macam pendekatan yaitu :

a) pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi bermaksud menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara masing-masing total produk bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara .

b) Pendekatan pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan maka nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi di perkirakan dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Dalam hal sektor pemerintahan dan dalam usaha yang sifatnya mencari keuntungan surplus usaha tidak diperhitungkan.

c) Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jadi kalau di lihat dari segi penggunaan maka total suplay dari barang dan jasa itu digunakan untuk :

- a) konsumsi rumah tangga ;
- b) konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung;
- c) konsumsi pemerintah;
- d) pembentukan model tetap bruto;
- e) perubahan stock;
- f) ekspor netto.

Untuk metode tidak langsung dilakukan dengan metode alokasi pendapatan nasional, yaitu dengan menghitung pendapatan regional dengan cara mengalokasikan angka pendapatan nasional untuk tiap-tiap daerah dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang dapat dipergunakan dapat didasarkan:

- a) nilai produksi bruto atau netto; b) jumlah produksi fisik; c) tenaga kerja;
- d) penduduk; e) alokator tidak langsung.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah secara nasional untuk setiap sektor.

2.2.7 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Chenery (1960:625) Tingkat pertumbuhan ekonomi dan peranan suatu sektor dalam menciptakan produksi regional tergantung kepada tingkat pendapatan dan jumlah penduduk daerah tersebut. Analisis Chenery berkaitan erat dengan perubahan sumbangan berbagai sektor dan industri-industri dalam sub-sektor industri pengolahan kepada produksi nasional.. Teori perubahan struktur menurut pola Chenery dipakai penulis untuk memperoleh perkiraan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang akan bermanfaat bagi perencanaan daerah untuk menentukan

apakah potensi PAD masih ada atau tidak dalam pertumbuhan ekonomi (Azis, 1994:198).

1. Landasan Operasional

Undang-undang No.25/1999 dengan jelas menetapkan ruang lingkup pengaturan yang dicakup didalamnya meliputi:

1. Dasar-dasar pembiayaan pemerintah daerah
2. Sumber-sumber penerimaan daerah
3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan
4. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan desentralisasi

Selanjutnya, mengenai sumber-sumber penerimaan daerah undang-undang tersebut menetapkan empat macam sumber penerimaan daerah yang meliputi:

1. pendapatan asli daerah
2. dana perimbangan
3. pinjaman daerah
4. lain-lain penerimaan yang sah

Sumber-sumber yang pertama dapat dikelompokkan sebagai sumber mutlak, karena secara mutlak menjadi hak pemerintah daerah. Tiga sumber berikutnya dapat dikelompokkan sebagai sumber tidak mutlak atau bersyarat. Dana tersebut baru dapat diterima pemerintah daerah setelah ada sharing dengan pemerintah pusat.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25/1999 dalam pasal 4 terdiri dari:

1. hasil pajak daerah;
2. hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan ;

4. lain-lain PAD yang sah..

Besar perolehan dana yang bakal diterima pemerintah daerah dari pendapatan Asli daerah sangat tergantung antara lain kepada ; (1) sumber/obyek pajak dan retribusi daerah; (2) ruang lingkup wewenang yang dimiliki.

3. Besar Alokasi Dana

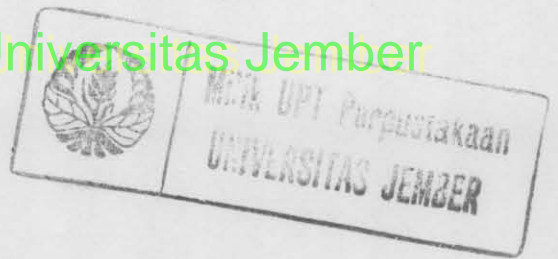
Menurut UU No.25/1999 pemerintah pusat memperoleh bagian lebih besar dari hasil alam berupa minyak dan gas, dibanding dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah memperoleh bagian lebih besar daripada pemerintah pusat dari sumber alam non-minyak dan gas, seperti tampak pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Besar Dana untuk Daerah menurut Sumber Penerimaan

Sumber Penerimaan	Alokasi (%)		Keterangan
	Daerah	Pusat	
PBB	90	10	Untuk Kabupaten dan Kota dibagikan
Bea Balik Nama	80	20	
Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan	80	20	
Pertambangan Minyak Bumi	15	85	Setelah dikurangi pajak
Pertambangan gas Alam	30	70	Setelah dikurangi pajak

Sumber: UU No. 25 /1999

Besarnya bagian pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat atas hasil alam non minyak dan gas tidak akan mampu mengalahkan bagian pemerintah pusat dari hasil sumber alam minyak dan gas. Walaupun demikian, masih terdapat kemungkinan bahwa penerimaan pemerintah daerah akan meningkat lebih tinggi setelah diberlakukannya Undang-undang no.25/1999. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa upaya daerah akan menjadi lebih intensif dan komprehensif dalam rangka mendapatkan sumber-sumber potensial, karena adanya motivasi peningkatan kesejahteraan daerah (Djoefri, 2000: 110-11113).



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Jember, dilihat dari pengaruh sektor basis terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Penelitian deskriptif secara harfiah adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif (Supranto, 1994:20).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan mencatat data dari Kantor Statistik Jawa Timur, Kantor Statistik Kabupaten Jember dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Jember, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, dan studi pustaka.

3.3 Metode Analisis

Untuk mengetahui sektor prioritas atau bukan prioritas dan proporsi laju pertumbuhan digunakan *Metode Location Quation (LQ)* dan *Dinamyc Location Quation*

1.1 Untuk Location Quation (LQ) dengan rumus (Azis, 1994:154) :

$$LQ_i^R = \frac{v_i^R / v_i^R}{V_i^R / V_i^R}$$

dimana :

LQ_i^R = Koefisien LQ sektor i di daerah tertentu

v_i^R = Nilai tambah sektor i di daerah tertentu

v_i^R = Nilai tambah semua sektor di daerah tertentu

V_i^R = Nilai tambah sektor i di daerah regional

V_i^R = Nilai tambah semua sektor di daerah regional

kriteria :

LQ = 1, maka sektor i hanya cukup untuk daerah sendiri

LQ > 1, maka sektor i merupakan sektor kuat, sehingga daerah tersebut mampu mengekspor hasil produksi dari sektor i

LQ < 1, maka sektor i merupakan sektor lemah, sehingga daerah tersebut mengimpor hasil produksi dari sektor i dari daerah lain

1.2 Untuk mengetahui proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB di suatu daerah dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB di daerah yang lebih luas digunakan rumus (Yuwono, 1999)

$$DLQ = \left\{ \frac{(1 + g_m) / (1 + g_n)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right\}$$

dimana :

DLQ = Koefisien DLQ sektor i di daerah tertentu

g_m = Laju pertumbuhan sektor i di daerah tertentu

g_n = Rata-rata laju pertumbuhan di daerah tertentu

G_i = Laju pertumbuhan sektor i di daerah regional

G = Rata-rata laju pertumbuhan daerah regional

kriteria:

DLQ = 1, proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB di suatu daerah sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut dengan laju pertumbuhan PDRB di daerah regional

$DLQ > 1$, Proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB di suatu daerah lebih cepat dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap laju pertumbuhan PDRB di daerah yang lebih luas

$DLQ < 1$, proporsi laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB di suatu daerah lebih rendah dibandingkan dengan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap laju pertumbuhan PDRB di daerah yang lebih luas

1.3 Kunci dasar dalam, persaingan antar daerah dalam daerah yang lebih luas adalah mempertahankan agar laju pertumbuhan PDRB suatu daerah tidak sampai terkalahkan dengan laju pertumbuhan PDRB daerah lain dalam daerah yang lebih luas. Indikator dari kemampuan itu dinyatakan dalam Indeks Total Keunggulan Daerah (ITKD) sebagai selisih dari laju pertumbuhan PDRB daerah yang lebih luas yang mewakili rata-rata laju pertumbuhan PDRB dari seluruh daerah. Rumus yang digunakan (Yuuwono, 1999):

$$ITKD = (g_n - G)$$

dimana :

ITKD = Indeks Total Keunggulan Daerah

g_n = Rata-rata laju pertumbuhan daerah tertentu

G = Rata-rata laju pertumbuhan daerah regional

kriteria :

ITKD = 0, Laju pertumbuhan PDRB suatu daerah tepat sama dengan laju pertumbuhan PDRB daerah yang lebih luas

ITKD > 0, daerah tersebut secara keseluruhan memenangkan persaingan dengan daerah-daerah lain dalam daerah regional

ITKD < 0, daerah tersebut kalah bersaing dengan daerah-daerah lain dalam daerah regional

Dari keunggulan daerah secara total dapat dihitung keuntungan yang diperoleh suatu daerah jika dibandingkan dengan laju yang sama daerah yang lebih luas, yaitu (Yuwono, 1999) :

$$TSS = (g_n - G)Y_{no}$$

dimana :

TSS = Total Shift Share

g_n = Rata-rata laju pertumbuhan daerah tertentu

G = Rata-rata laju pertumbuhan daerah regional

Y_{no} = PDRB daerah regional

Persamaan diatas dapat diuraikan dengan memasukan g_{in} dan G_i dan ditambah untuk seluruh sektor menjadi (Yuwono, 1999):

$$TSS = \sum (g_n - g_{in})X_{ino} + \sum (G_i - G)X_{ino} + \sum (g_{in} - G_i)X_{ino}$$

Dengan $\sum (g_n - g_{in})X_{ino} + \sum (G_i - G)X_{ino}$ adalah *Structural Shift Share (SSS)* di suatu daerah maupun di daerah regional, dan $\sum (g_{in} - G_i)X_{ino}$ adalah *Locational Shift Share (LSS)*. *Structural Shift Share* pada dasarnya adalah perbedaan laju pertumbuhan PDRB suatu daerah dengan daerah yang lebih luas yang terjadi karena perbedaan pangsa sektoral, kendati laju pertumbuhan sektoral suatu daerah maupun daerah regional tepat sama. Sedangkan *Locational Shift Share* adalah perbedaan laju pertumbuhan PDRB suatu daerah bagian daerah regional yang terjadi karena perbedaan laju pertumbuhan sektoral, kendati pangsa sektoralnya tetap sama (Rietveld, 1985; Wijayanto, 1999). Apabila $SSS < 0$, menunjukkan bahwa sektor i pada suatu daerah pertumbuhannya lambat. Sedangkan apabila $SSS > 0$, menunjukkan bahwa sektor i pada suatu daerah pertumbuhannya cepat. Apabila $LSS > 0$, maka berarti bahwa suatu daerah mempunyai daya saing yang baik apabila dibandingkan dengan daerah lainnya untuk sektor i . Sedangkan apabila $LSS < 0$,

maka berarti bahwa sektor i pada suatu daerah tidak dapat bersaing dengan baik apabila dibandingkan dengan daerah lainnya. Nilai 0 dari *structural shift share* maupun *locational shift share* menyatakan pangsa sektoral suatu daerah tepat sama dengan daerah yang lebih luas. Dengan laju pertumbuhan sektoral tepat sama. Nilai positif atau negatif menunjukkan keuntungan yang dinikmati atau kerugian yang diderita suatu daerah atas keunggulan atau kelemahan struktur atau lokasi daerah terhadap daerah lain dalam daerah regional.

1.4 Definisi Variabel Operasional

1. Analisis penentuan prioritas pembangunan sektor ekonomi di Kabupaten Jember, merupakan analisis tentang pemusatan atau prioritas terhadap sektor di Kabupaten Jember dianggap produktif yaitu mampu mendorong lahirnya usaha baru sehingga sektor tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut. Sektor tersebut lebih dikenal dengan sebutan sektor unggulan.
2. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perda sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjukkan.
4. Retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.
5. Dalam perhitungan PDRB digunakan dasar harga konstan karena atas dasar harga konstan mencerminkan volume produksi daerah. Volume produksi daerah inilah yang digunakan sebagai indikator dari aktifitas ekonomi daerah..
6. Sektor Pertanian adalah Tanaman bahan makanan, peternakan dan hasil-hasilnya, perikanan.

7. Sektor penghasil Ekspor merupakan sektor ekonomi Kabupaten Jember yang menghasilkan barang-barang ekspor, dan yang dimaksud ekspor disini meliputi ekspor keluar Kabupaten Jember atau luar propinsi dan luar negeri.
8. Proporsi laju pertumbuhan adalah kenaikan PDRB di suatu daerah yang disebabkan produktifitas sektor ekonomi tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertambahan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak.
9. Dinamyc Location Quation. Sama dengan Location Quation, hanya untuk mengintroduksi laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa setiap nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan pertahun sendiri-sendiri selama kurun waktu (0) dan tahun (t).
10. Analisis Shift Share adalah suatu alat analisis untuk mengidentifikasi sumber atau komponen pertumbuhan wilayah dan untuk menduga dampak kebijakan wilayah pada ketenagakerjaan.
11. Indeks total Keunggulan Daerah adalah indikator kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan agar laju pertumbuhan PDRB daerah tidak sampai terkalahkan dengan laju pertumbuhan PDRB daerah lain dalam daerah regional.
12. Total Shift Share adalah hasil keuntungan yang diperoleh oleh suatu daerah yang mempunyai laju sama dengan daerah regional.
13. Struktural Shift Share adalah perbedaan laju pertumbuhan PDRB suatu daerah dengan daerah regional yang terjadi karena perbedaan pangsa sektoral, kendati laju pertumbuhan sektoral suatu daerah maupun daerah regional tepat sama.
14. Locational Shift Share adalah perbedaan laju pertumbuhan PDRB suatu daerah dengan daerah regional yang terjadi karena perbedaan laju pertumbuhan sektoral, kendati pangsa sektoralnya tetap sama.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur, yang memiliki 31 kecamatan dengan luas daerah 2.493,35 km². Sebagai pusat pertumbuhan daerah hinterland Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember akan memberikan keterkaitan yang menguntungkan daerah-daerah tersebut. Secara geografis, Kabupaten Jember terletak diantara 6^o 27' - 7^o 14' bujur timur dan 7^o 59' - 8^o 33'. Secara topografi tinggi wilayah 0-3.300 m dari permukaan laut (d.p.l) dengan iklim sedang. Daerah ini mempunyai banyak sungai, gunung, bukit (gumuk) tidak kurang dari 91 buah, di tambah dengan daratan ngarai yang subur dan air mudah diperoleh baik untuk keperluan irigasi dan keperluan sehari-hari.

4.1.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Jember menurut data Kantor Statistik Jember pada tahun 2000 sebesar 2.162.688 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jember tahun 1996-2000

Tahun	Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
1996	2.061.877	-
1997	2.078.701	0,82
1998	2.083.068	0,24
1999	2.106.632	1,10
2000	2.162.688	2,26

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember, Oktober 2000

Tabel 4.1 menyatakan bahwa angka pertumbuhan rata-rata penduduk mulai 1996 sampai tahun 2000 relatif kecil yaitu sebesar 0,96 % per tahun. Kecenderungan pertumbuhan penduduk yang kecil ini dapat diakibatkan karena keberhasilan program KB, migrasi penduduk yang berfluktuasi. Di samping itu laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh empat hal, yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), imigrasi (migrasi masuk), emigrasi (migrasi keluar).

4.1.2 Kepadatan Penduduk dan Pendapatan Perkapita

a. Kepadatan Penduduk

Dari hasil registrasi penduduk ternyata penduduk Kabupaten Jember tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 0,96 % dibanding akhir 1999, sejalan dengan bertambahnya penduduk maka kepadatan bertambah dari 684 jiwa/km² pada akhir tahun 1999 menjadi 871,31 jiwa/km² pada akhir tahun 2000. Tingkat kepadatan masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Jember berbeda satu sama lain. Perbedaan ini dapat disebabkan karena adanya laju pertumbuhan penduduk masing-masing daerah tersebut berbeda, disamping pula disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk dari daerah yang satu ke daerah yang lain.. Perpindahan penduduk ini disebabkan oleh karena adanya daya tarik daerah tujuan yang dapat berupa laju pembangunan yang cukup tinggi, luasnya lapangan kerja yang tersedia, besarnya pendapatan yang diterima, adanya jaminan keamanan, tersedianya berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dengan adanya daya tarik tersebut menyebabkan tingkat kepadatan penduduk masing-masing daerah berbeda.

Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Kaliwates dengan kepadatan penduduk sebanyak 3.780,91 jiwa per km². Kecamatan lainnya yang dianggap mempunyai daya tarik setelah Kecamatan Kaliwates ialah Kecamatan Sumbersari dan Patrang dengan tingkat kepadatan penduduk masing-masing adalah 2.950,88 jiwa per km² dan 2.527 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Tempurejo yakni sebesar 234,73 jiwa per km².

Untuk lebih jelas mengetahui tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2000, maka dapat dilihat tabel 4.2

Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Jember Tahun 2000

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Rangking
1	Kaliwates	24,73	93.502	3780,914	1
2	Sumbersari	35,28	104.107	2950,879	2
3	Patrang	35,28	89.180	2527,778	3
4	Arjasa	40,00	35.383	884,575	18
5	Jelbuk	42,15	29.699	704,6026	24
6	Pakusari	29,19	37.524	1285,509	10
7	Sukowono	43,55	54.779	1257,842	11
8	Kalisat	50,53	66.631	1318,642	9
9	Ledokombo	70,35	57.414	816,1194	22
10	Sumberjambe	65,62	55.122	840,0183	20
11	Mayang	53,69	43.983	819,2028	21
12	Silo	310,98	91.622	294,6234	30
13	Mumbulsari	93,11	56.934	611,4703	28
14	Tempurejo	302,26	70.948	234,7251	31
15	Rambipuji	54,83	68.925	1257,067	12
16	Panti	94,15	56.674	601,9543	29
17	Sukorambi	40,52	35.097	866,1649	19
18	Jenggawah	57,51	76.958	1338,167	8
19	Tanggul	107,14	76.304	712,1897	23
20	Bangsalsari	166,78 ✓	105.460	632,33	25
21	Sumberbaru	159,41 ✓	97.513	611,7119	27
22	Kencong	58,65	65.848	1122,728	15
23	Gumukmas	81,45	50.663	622,0135	26
24	Puger ✓	73,57	105.435	1433,125	6
25	Umbulsari	64,44	70.140	1088,454	16
26	Wuluhan	88,99	105.772	1188,583	14
27	Jombang	50,05	77.142	1541,299	5
28	Ambulu	104,39	100.320	961,0116	17
29	Ajung	46,63	65.043	1394,875	7
30	Balung	46,85	73.328	1565,165	4
31	Semboro	36,55	44.971	1230,397	13
Total		2.493,35	2.162.421	867,2754	-

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember, Oktober 2000

b. Pendapatan Per Kapita

Untuk melihat besarnya pembangunan yang diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan informasi pendapatan per kapita yang di hitung tiap tahun (satu periode) dapat dipakai sebagai tolak ukur meskipun kurang memuaskan, sebab informasi ini sebagai rata-rata hitung sehingga mencerminkan adanya perolehan yang sesungguhnya telah diterima masyarakat, dengan kata lain hal-hal yang bersifat sosial atau kualitatif kurang diperhitungkan.

Dengan pedoman perhitungan per kapita, keadaan Kabupaten Jember, dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Pertumbuhan pendapatan perkapita Atas Dasar Harga konstan 2000 di Kabupaten Jember Tahun 1996-2000

No	Tahun	Pendapatan Per Kapita (Ribuan Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	1996	984,35	-
2	1997	1.021,58	3,64
3	1998	927,29	- 0,16
4	1999	938,50	1,19
5	2000	966,27	2,87

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember, Oktober 2000

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita mengalami fluktuasi tajam pada awal krisis ekonomi tahun 1998 .

4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Jember dapat digambarkan dengan menunjukkan adanya distribusi mata pencaharian, distribusi PDRB menurut sektor dan perkembangan ekonomi sektoral. Setelah melihat bagaimana keadaan sosial ekonominya tentu akan mudah bagi pemerintah daerah untuk mengetahui

potensi-potensi daerah yang dimiliki guna dikembangkan, sehingga pemerintah daerah mampu membuat strategi pembangunan daerah yang tepat.

a. Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Usaha

Distribusi penduduk dapat digolongkan dalam berbagai macam, tergantung dari tujuan yang ingin diketahui. Salah satunya adanya distribusi penduduk menurut lapangan usaha. Dengan melihat distribusi ini akan diketahui sumber penghasilan dan kemampuan lapangan kerja tersebut dalam menyerap tenaga kerja.

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Jember pada tahun 1999 bekerja di bidang pertanian yakni sebesar 451.935 jiwa, hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Tabel 4.4 memperlihatkan keadaan tersebut.

Tabel 4.4 Distribusi Penduduk Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jember Tahun 2000

No	Lapangan Usaha	Penduduk	Persentase
1	Pertanian	451,935	49,56
2	Industri	82,383	9,03
3	Perdagangan	189,171	20,74
4	Jasa-jasa	59,712	6,55
5	Lainnya	128,806	14,12
	Jumlah	911,907	100

Sumber : Kantor Dinas Tenaga kerja Kabupaten Jember, 1999: Oktober 2001

b. Distribusi PDRB Menurut Sektor

Melihat sumbernya PDRB dihasilkan dari "Value Added" tiap-tiap sektor/sub sektor, yang mana dari informasi ini dapat diketahui struktur perekonomian suatu daerah, apakah daerah itu daerah pertanian, industri, perdagangan atau jasa. Hal ini mempunyai arti sendiri bagi perencanaan pembangunan daerah.

Di Kabupaten Jember kegiatan ekonomi banyak terpusat pada kegiatan di sektor pertanian, dimana sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Jember, yaitu sebesar Rp.0,707 milyar pada tahun 1999, kemudian berikutnya disusul oleh sektor perdagangan Rp.0,463. Untuk mengetahui distribusi semua sektor terhadap PDRB Kabupaten Jember lihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Jember Tahun 1995-1999 (dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	1995	1996	1997	1998	1999
1	Pertanian	628,616.17	680,964.41	697,831.27	706,933.9	707,416.24
2	Perkebunan	261,873.51	284,661.75	288,037.01	173,739.68	168,388.26
3	Kehutanan	6,799.79	7,178.83	5,679.49	5,438.91	5,925.82
4	Pertambangan dan Penggalian	10,322.64	10,415.47	10,454.92	10,283.42	10,380.95
5	Industri Pengolahan	145,376.68	152,422.69	158,061.74	147,382.56	149,443.99
6	Listrik, Gas dan Air Bersih	21,573.94	24,700.39	28,142.03	28,710.67	32,844.80
7	Bangunan	85,124.59	88,172.04	89,965.93	57,966.83	59,137.93
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	374,247.61	418,113.04	455,455.50	454,294.90	463,618.06
9	Pengangkutan dan Komunikasi	120,547.17	130,006.19	139,392.02	143,530.47	146,077.54
10	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	127,628.76	145,369.27	156,083.05	151,548,04	134,163.12
11	Jasa-Jasa	214,593.85	228,695.16	240,227.56	256,011.14	259,588.54
PDRB		1.996.704.71	2,170,699.24	2.269,330.52	2,097,376.00	2,136,985.25

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Jember, Oktober 2001

c. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember tahun 1996 atas dasar harga berlaku sebesar 4,35, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar

1,21. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember yang telah diuraikan diatas tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektornya. Sektor pertanian yang berperan paling besar terhadap total PDRB dalam tahun 1999 ini mampu naik sebesar 0,06 %. Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 1,40 %, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 14,40 % lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,02 %. Sektor bangunan mempunyai pertumbuhan 2,02 % pada tahun 1999 mengalami kenaikan dari nilai pertumbuhan tahun 1998 yang mencapai pertumbuhan sebesar -35,57 %. Sektor perdagangan mempunyai pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu sebesar 2,05 % lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 1998 sebesar -0,25%. Sektor perdagangan ini mempunyai andil terbesar kedua setelah pertanian yaitu sebesar 21,69 % terhadap PDRB. Sektor pertambangan dan penggalian hanya tumbuh -1,64 % pada tahun 1998 dan naik menjadi 0,95 % pada tahun 1999.

Dalam kelompok sektor tersier, sektor jasa-jasa mengalami penurunan tajam dari semua sektor yang ada yakni sebesar 6,57 % di tahun 1998 dan 1,40 % di tahun 1999. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar 2,97 % pada tahun 1998 dan sebesar 1,77 % pada tahun 1999. Untuk lebih jelas mengetahui pertumbuhan ekonomi sektoral dari tahun 1996-1999, maka dapat dilihat tabel 4. 6.

mencapai pertumbuhan rata-rata 3,05 % (lihat lampiran 4). Dibandingkan dengan sektor yang sama di Propinsi Jawa Timur, tingkat rata-rata pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih tidak terpaut jauh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,99 %. Sehingga pada masa akan datang sektor listrik, gas dan air bersih mempunyai prospektif yang lebih bagus sebagai sektor unggulan di Kabupaten Jember dengan nilai DLQ sebesar 1,05 (lihat tabel 4.6) yang diakibatkan dari keunggulan lokasional .

d. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-Jasa

Kabupaten Jember merupakan daerah yang ada pada lingkungan pengaruh (zone of influence) atau lingkungan tata ruang (spatied field) dari masing-masing pusat (node). Antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang akan terjadi suatu interaksi, yang mana interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk arus barang, penduduk, informasi dan lain-lain. Daerah belakang merupakan daerah terpengaruh, dan akan menerima (membutuhkan) jasa-jasa pelayanan baik sosial maupun ekonomi dan pemerintahan dari pusat pertumbuhan. Sehingga tingkat rata-rata pertumbuhan ketiga sektor tersebut di Kabupaten Jember bersifat dinamis dengan nilai rata-rata pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,61 % ; sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar 1,72 % serta sebesar 4,90 % pada sektor jasa-jasa. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa di Propinsi Jawa Timur tidak sebegitu dinamis dibandingkan dengan Kabupaten Jember. Sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan mengalami rata-rata tingkat pertumbuhan dibawah nol yaitu sebesar -4,09%. Hal ini disebabkan pada tahun 1998 dan 1999 sektor tersebut mengalami fluktuasi negatif yaitu -20,49 % dan -5,73 %. Pada tahun tersebut kondisi perekonomian mengalami krisis yang cukup hebat akibat sektor moneter mengalami tekanan dari nilai tukar mata uang. Sehingga dampak tersebut menghantam sektor lainnya seperti sektor perdagangan, sektor bangunan dan Jasa Perusahaan. Sektor tersebut tidak luput dari angka pertumbuhan di bawah nol,

tahun ke tahun cukup bervariasi. Pertumbuhan yang terbesar terjadi pada tahun 1996/1997 dengan persentase peningkatannya sebesar 40,15 % dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1997/1998 dengan persentase pertumbuhan sebesar -9,69 % dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.7 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember
Tahun 1990/1991-1999//2000 (000 rupiah)

No	Tahun	Jumlah	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	1990/1991	4.698.565	-	-
2	1991/1992	5.534.949	836.384	17,80084
3	1992/1993	6.494.500	959.551	17,33622
4	1993/1994	6.558.851	64.351	0,990854
5	1994/1995	8.110.296	1.551.445	23,65422
6	1995/1996	10.709.882	2.599.586	32,05291
7	1996/1997	15.048.073	4.338.191	40,50643
8	1997/1998	13.589.542	-1.458.531	-9,69248
9	1998/1999	17.467.778	3.878.236	28,53839
10	1999/2000	24.378.547	6.910.769	39,56295

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Jember (data diolah)

4.2 Hasil dan Pembahasan Potensi Sektoral Kabupaten Jember

4.2.1 Hasil Analisis

Untuk mengetahui potensi sektor ekonomi Kabupaten Jember, Maka digunakan data PDRB atas dasar harga konstan 1999 menurut lapangan usaha pada tahun 1995-1999. Pendekatan yang digunakan dalam metode *Location Quotient* (LQ) statis dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) yang membandingkan besarnya PDRB Kabupaten Jember dengan PDRB Propinsi Jawa Timur. Teknik analisis LQ dan DLQ merupakan cara permulaan untuk mengetahui “kekuatan” atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain yang lebih luas. Tahap pertama teknik ini sudah cukup memberi gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dalam sektor yang diamati. Dalam literatur pembangunan daerah disebutkan bahwa suatu sektor di sebuah daerah

yang mempunyai LQ diatas satu merupakan sektor “basis” , sehingga daerah yang bersangkutan secara potensial merupakan pengeksport produk sektor tersebut ke daerah lain dan begitu juga sebuah daerah yang mempunyai DLQ lebih dari satu berarti proporsi laju pertumbuhan suatu sektor terhadap PDRB daerah bersangkutan lebih cepat dibandingkan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang lebih luas. Pada masa depan, kalau keadaan masih tetap sebagaimana adanya saat ini, maka dapat diharapkan bahwa sektor ini akan unggul dalam persaingan. Tafsiran inilah yang dapat diberlakukan untuk sektor-sektor di Kabupaten Jember (Yuwono, 1999: 51).

Berdasarkan perhitungan nilai LQ statis untuk tahun 1999, terlihat ada dua sektor/subsektor ekonomi Kabupaten Jember yang menonjol, yaitu sektor pertanian dan subsektor tanaman perkebunan dengan nilai LQ statis 2,017 dan 4,177 (lihat tabel 4.8). Hal ini berarti bahwa sektor dan subsektor ini merupakan sektor basis di Kabupaten Jember dan memiliki daya saing terhadap daerah-daerah lain dalam lingkup Propinsi Jawa Timur

Berdasarkan kriteria DLQ, seperti terlihat pada Tabel 4.8, jumlah sektor dan subsektor ekonomi yang memiliki nilai DLQ lebih dari satu adalah sebanyak lima sektor, yaitu : pertambangan dan penggalian (1,679), listrik, gas dan air bersih (1,055), sektor perdagangan, hotel dan restoran (1,122), sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan (1,155) dan sektor jasa (1,083). Hal ini berarti bahwa kelima sektor ini memiliki daya saing yang relatif bertahan lama terhadap sektor-sektor yang sama dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, dan merupakan sektor-sektor basis Kabupaten Jember di masa akan datang . Sektor pertanian dan subsektor tanaman perkebunan yang menurut kriteria LQ merupakan sektor basis, tidak memiliki DLQ lebih dari satu. Namun sektor pertanian masih mampu dijadikan sebagai sektor unggulan di masa mendatang walaupun nilai DLQ-nya kurang dari satu. Hal ini tergantung dari pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan pembenahan struktur ekonomi.

Dilihat dari kriteria Shift Share, Kabupaten Jember telah diuntungkan sebesar Rp. 45,763 milyar dengan laju pertumbuhannya selama empat tahun terhitung sejak tahun 1996 hingga tahun 1999 bila dibandingkan laju pertumbuhan Propinsi Jawa Timur. Keuntungan ini berasal dari faktor lokasional sebesar Rp. 36,513 milyar dan sisanya sebesar Rp. 9,250 milyar dari faktor struktural. Seluruh sektor memiliki kontribusi terhadap keuntungan ini, seperti terlihat pada nilai Total Shift Share pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 LQ dan SS Kabupaten Jember Terhadap Propinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha, tahun 1995-1999

No	Sektor /Subsektor	LQ		Shift Share (SS) (miliar rp)		
		Statis	Dinamis	Locational Shift Share	Struktural Shift Share	Total Shift Share
1	Pertanian	2,017	0,998	14,217	0,190	14,407
2	Tanaman Perkebunan	4,177	0,670	-19,280	25,282	6,002
3	Kehutanan	0,666	0,925	0,022	0,133	0,155
4	Pertambangan dan Penggalian	0,274	1,679	1,460	-1,223	0,236
5	Industri Pengolahan	0,237	0,950	1,443	1,888	3,331
6	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,549	1,055	0,850	-0,355	0,494
7	Bangunan	0,569	0,921	0,171	1,779	1,951
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,812	1,122	19,836	-11,259	8,577
9	Pengangkutan dan Komunikasi	0,817	0,941	0,963	1,798	2,762
10	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	0,873	1,155	7,425	-4,500	2,925
11	Jasa-Jasa	0,906	1,083	9,401	-4,483	4,918
	PDRB	1,081	1,045	36,513	9,249	45,763

Sumber : data diolah

a. Sektor Pertanian dan Subsektor Tanaman Perkebunan

Hasil perhitungan pada lampiran 2 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang berpotensi untuk meningkatkan kemajuan perekonomian daerah khususnya peningkatan pendapatan regional. Perhitungan pada lampiran 2 bahwa secara umum selama tahun 1995-1999 sektor pertanian nilai LQ-nya yaitu berturut-turut sebesar 2,23 pada tahun 1995; sebesar 2,22 pada tahun 1996; sebesar 2,23 pada tahun 1997; sebesar 1,99 pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 sebesar 2,01.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 1995 sektor pertanian menjadi sektor yang berpotensi sebagai sektor “basis” dibanding sektor-sektor yang lain. Namun perhitungan LQ sektor pertanian tidak bisa lepas dari subsektor tanaman perkebunan, sebab hasil perhitungan LQ subsektor tanaman perkebunan pada lampiran 2 menunjukkan bahwa selama lima tahun subsektor tanaman perkebunan merupakan subsektor yang memberikan kontribusi pada sektor pertanian dan PDRB Kabupaten Jember yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari nilai LQ-nya sangat stabil dengan nilai berturut-turut yaitu sebesar 4,63 pada tahun 1995; sebesar 4,61 pada tahun 1996; sebesar 4,63 pada tahun 1997; sebesar 4,13 pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 sebesar 4,17. Adanya peningkatan nilai LQ pada sektor pertanian menunjukkan bahwa terdapat kestabilan pertumbuhan di sektor pertanian dimana variasi pertumbuhannya dalam sektor tersebut relatif kecil dibandingkan dengan sektor lain. Namun sebaliknya subsektor tanaman perkebunan mengalami fluktuasi pertumbuhan yang sangat tajam lihat tabel 4.6, pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan mengalami penurunan dari 1,19 % pada tahun 1997 turun menjadi -39,68 % pada tahun 1998. Walaupun demikian subsektor tanaman perkebunan memiliki nilai $LQ > 1$ lihat lampiran 2, besarnya nilai LQ subsektor tersebut menunjukkan bahwa peranan subsektor tanaman perkebunan di Kabupaten Jember paling baik daripada peranan subsektor tanaman perkebunan di Propinsi Jawa Timur.

Peranan sektor pertanian dan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Jember terlihat pada lampiran 6. Pada lampiran itu dapat dikemukakan

bahwa secara proporsional PDRB sektor pertanian selain terbesar juga mengalami kenaikan sebesar 2,25 % pada tahun 1998 yang menyumbang sebesar 33,10 % dibandingkan tahun 1997 yang menyumbang sebesar 30,75 % . Kondisi tersebut tidak diimbangi subsektor tanaman perkebunan yang mengalami kenaikan negatif secara gradual, subsektor tanaman perkebunan pada tahun 1995 memberikan kontribusi pada PDRB sebesar 13,12 % dan pada tahun 1999 mengalami kenaikan -5,24 % sehingga menjadi 7,88 %. Sementara pada periode yang sama di tingkat Propinsi Jawa Timur peranan sektor pertanian di dalam menyumbang PDRB tidak begitu dominan, yakni sebesar 14,07 % pada tahun 1995 dan mengalami kenaikan positif sebesar 0,07 % pada tahun 1999 sehingga menjadi 15,04 % dan peranan subsektor tanaman perkebunan di dalam menyumbang PDRB Jawa Timur lebih kecil, yakni sebesar 2,83 % pada tahun 1995 tetapi fluktuasi kontribusi subsektor tersebut terhadap PDRB lebih stabil dibandingkan sektor ekonomi lainnya di Jawa Timur yaitu rata-rata 3,6 % sehingga peranan subsektor tanaman perkebunan tidak begitu terpengaruh secara signifikan jika dilihat dari nilai kontribusi sektoral PDRB Propinsi Jawa Timur (lihat lampiran 7). Dari angka-angka tersebut jelas diketahui bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling besar memberikan andil terhadap pembentukann PDRB Kabupaten Jember dari sembilan sektor yang ada dan keberhasilan sektor pertanian tidak lepas dari pengaruh subsektor tanaman perkebunan walupun mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998 lihat lampiran 4 yakni -39,68 % . Kondisi tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan pembangunan terutama di dalam meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor nonmigas.

b. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tingkat pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Jember menunjukkan angka pertumbuhan yang paling rendah dibandingkan angka pertumbuhan sektor ekonomi lain, jika dilihat pada periode waktu antara tahun 1995

sampai dengan tahun 1998 pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mencapai angka 0,90 % dan pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar 1,54 %, angka pertumbuhan ini mengalami kenaikan pada tahun 1999 sebesar 0,69 %. Dibandingkan dengan angka pertumbuhan sektor yang sama di Propinsi Jawa Timur, sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan angka yang tidak begitu lebih baik, pada tahun 1995 sektor ini mencapai pertumbuhan sebesar 1,27 % tetapi pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 mengalami pertumbuhan di bawah nol, namun ada peningkatan sebesar 18,97 % pada tahun 1999 (lihat lampiran 5). Dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar 0,15 %, sektor pertambangan dan penggalian belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Jember (lihat lampiran 6). Peranan sektor ini hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 0,52 % pada tahun 1995 dan kontribusi sektor tersebut mengalami penurunan pada tahun 1999 sebesar 0,49 %, sehingga dalam perhitungan LQ sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang perolehan nilai LQ-nya paling kecil setelah sektor industri pengolahan. Hasil perhitungan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 nilai LQ mengalami stagnasi, nilai LQ hanya mampu berkisar diangka 0,30 sehingga secara tidak langsung menggambarkan Kabupaten Jember dalam memenuhi kebutuhan sektor pertambangan dan penggalian lebih banyak melakukan impor dengan nilai impor 70 % (lihat lampiran 2). Walaupun demikian sektor pertambangan dan penggalian pada masa akan datang memiliki potensi sebagai sektor ekonomi unggulan Kabupaten Jember. Dalam tabel 4.8 sektor pertambangan dan penggalian memiliki nilai DLQ sebesar 1,68. Nilai tersebut berasal dari keuntungan lokasional sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Jember.

c. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih di Kabupaten Jember cukup tinggi, karena sektor listrik, gas dan air bersih termasuk kebutuhan primer yang bersifat inelastis sehingga pertumbuhan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 mencapai tingkat rata-rata 11,21 % dibandingkan dengan sektor pertanian yang

mencapai pertumbuhan rata-rata 3,05 % (lihat lampiran 4). Dibandingkan dengan sektor yang sama di Propinsi Jawa Timur, tingkat rata-rata pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih tidak terpaut jauh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,99 %. Sehingga pada masa akan datang sektor listrik, gas dan air bersih mempunyai prospektif yang lebih bagus sebagai sektor unggulan di Kabupaten Jember dengan nilai DLQ sebesar 1,05 (lihat tabel 4.6) yang diakibatkan dari keunggulan lokasional .

d. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa-Jasa

Kabupaten Jember merupakan daerah yang ada pada lingkungan pengaruh (zone of influence) atau lingkungan tata ruang (spatial field) dari masing-masing pusat (node). Antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang akan terjadi suatu interaksi, yang mana interaksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk arus barang, penduduk, informasi dan lain-lain. Daerah belakang merupakan daerah terpengaruh, dan akan menerima (membutuhkan) jasa-jasa pelayanan baik sosial maupun ekonomi dan pemerintahan dari pusat pertumbuhan. Sehingga tingkat rata-rata pertumbuhan ketiga sektor tersebut di Kabupaten Jember bersifat dinamis dengan nilai rata-rata pada sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 5,61 % ; sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar 1,72 % serta sebesar 4,90 % pada sektor jasa-jasa. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa di Propinsi Jawa Timur tidak sebegitu dinamis dibandingkan dengan Kabupaten Jember. Sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan mengalami rata-rata tingkat pertumbuhan dibawah nol yaitu sebesar -4,09%. Hal ini disebabkan pada tahun 1998 dan 1999 sektor tersebut mengalami fluktuasi negatif yaitu -20,49 % dan -5,73 %. Pada tahun tersebut kondisi perekonomian mengalami krisis yang cukup hebat akibat sektor moneter mengalami tekanan dari nilai tukar mata uang. Sehingga dampak tersebut menghantam sektor lainnya seperti sektor perdagangan, sektor bangunan dan Jasa Perusahaan. Sektor tersebut tidak luput dari angka pertumbuhan di bawah nol,

pada tahun 1998 sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan $-5,32\%$, sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun yang sama mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar $-17,79\%$. Walaupun demikian kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PDRB Propinsi Jawa Timur tidak mengalami penurunan yang buruk, kecuali sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan pada tahun 1999 turun dari $6,06\%$ menjadi sebesar $5,65\%$ (lihat lampiran 7).

Kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Jember juga bergerak cukup stabil seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi terhadap PDRB pada tahun 1998 sebesar $21,27\%$ dan pada tahun 1999 naik sebesar $21,69\%$, untuk sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan hanya mengalami penurunan sebesar $0,72\%$ pada tahun 1999. Sektor jasa-jasa mengalami kenaikan sebesar $0,16$ pada tahun 1999 sehingga menjadi sebesar $12,15\%$.

Pada masa mendatang sektor-sektor tersebut dapat menjadi sektor unggulan jika Pemerintah Kabupaten Jember mampu melakukan restrukturisasi ekonomi dengan mengacu UU otonomi daerah tahun 1999 karena dilihat dari nilai DLQ sektor-sektor tersebut memiliki nilai sama dengan satu yang berarti proporsi PDRB Kabupaten Jember sebanding dengan proporsi laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur.

4.2.2 Pembahasan

Kabupaten Jember mempunyai sifat kota dengan karakteristik yang di dominasi oleh sektor primer dan sektor sekunder. Kondisi ekonomi dan perkembangannya dapat diamati dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. PDRB Kabupaten Jember tahun 1999 sebesar Rp. 2,136 milyar, yang didominasi oleh tiga sektor, yaitu sektor pertanian dengan pangsa $33,10\%$, sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan pangsa $21,69\%$, dan sektor jasa-jasa dengan pangsa $12,15\%$ (lihat lampiran 6). Jika dibandingkan dengan tahun 1995, rata-rata laju

pertumbuhan PDRB sebesar 1,32 % per tahun, akibat pertumbuhan yang cenderung negatif pada tahun 1998 untuk beberapa sektor yaitu sektor pertambangan dan penggalan sebesar -1,64 % per tahun ; sektor industri pengolahan sebesar -6,76 % per tahun; sektor bangunan sebesar -35,57 % per tahun; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0,25 % per tahun; sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar -2,91 % per tahun (lihat lampiran 4).

Pada tahun yang sama PDRB Propinsi Jawa Timur Rp. 55,038 milyar, yang di dominasi oleh empat sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan sebesar 27,37%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 21,30 %, sektor pertanian sebesar 15,04 % dan sektor jasa-jasa sebesar 11,29 % (lihat lampiran 7) . Dengan demikian nampak bahwa karakteristik Kabupaten Jember tidak berbeda dengan Jawa Timur umumnya. Untuk rata-rata laju pertumbuhan kecuali sektor pertanian, listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi , sektor jasa-jasa, sektor lain-lain tumbuh negatif (lihat lampiran 5). Sumbangan terbesar diberikan oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 7,27 % per tahun dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 4,15 % per tahun.

Keunggulan Kabupaten Jember dibandingkan dengan daerah yang lain di Jawa Timur, dapat di baca dari taabel 4.6. Dilihat dari nilai LQ statis pada tahun 1999, beberapa sektor di Kabupaten Jember unggul dibandingkan dengan daerah yang lain di Jawa Timur, yaitu sektor pertanian, sub sektor tanaman perkebunan dan sektor jasa-jasa. Jika dilihat dari nilai DLQ, kecuali subsektor tanaman perkebunan, sektor unggulan di Kabupaten Jember masih dapat diharapkan unggul di kemudian hari yaitu sektor pertanian sebesar 0,99 dan sektor jasa-jasa sebesar 1,08. Sedangkan sektor yang tidak di unggulkan sekarang ini, nampaknya ada empat sektor yang sebenarnya dapat diharapkan unggul di kemudian hari, yaitu sektor pertambangan dan penggalan dengan nilai sebesar 1,68; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,12; sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan sebesar 1,16 serta sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,05 (lihat lampiran 3).

Jika dilihat dari nilai TSS, Kabupaten Jember telah diuntungkan Rp. 45,763 milyar dengan laju pertumbuhannya selama empat tahun itu dibandingkan jika bertumbuh sama dengan laju pertumbuhan Propinsi Jawa Timur. Keuntungan tersebut adalah hasil sumbangan positif dari keunggulan lokasional maupun keunggulan struktural, namun Rp.36,513 milyar dari Rp. 45,763 milyar di sumbangkan oleh keunggulan lokasional. Seluruh sektor telah memberikan sumbangan positif pada keuntungan daerah, kendati kecil-kecil. Hal ini terjadi karena keuntungan lokasional dipakai untuk menutup kerugian struktural atau sebaliknya.

Pemanfaatan keunggulan lokasional nampak pada beberapa sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa. Keunggulan lokasional tersebut terjadi karena :

- a. Kabupaten Jember merupakan pusat pertumbuhan daerah tapal kuda yang memberikan peluang memperoleh spread effect dari aktifitas yang terjadi di Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan. Namun yang menjadi tanda tanya, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan tidak mampu memanfaatkan keunggulan lokasional ini. Hal ini dikarenakan masalah pengembangan jasa pariwisata daerah dan pusat bisnis amat tertinggal dibandingkan dengan pengembangan jasa yang lain.
- b. Di Jember terdapat beberapa perguruan tinggi yang cukup terkenal, terutama Universitas Jember, sehingga banyak penduduk daerah lain yang berkomunikasi dengan Kabupaten Jember. Kedatangan mereka ke Kabupaten Jember telah menghidupkan secara keseluruhan ekonomi masyarakat Kabupaten Jember. Inilah sebabnya mengapa sektor listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan mampu memberikan keuntungan bagi daerah.

Tiga sektor dan dua subsektor yang memiliki keunggulan struktural adalah Subsektor kehutanan, subsektor tanaman perkebunan, sektor industri pengolahan,

Tiga sektor dan dua subsektor yang memiliki keunggulan struktural adalah Subsektor kehutanan, subsektor tanaman perkebunan, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi dan secara lokasi tiga sektor dan dua subsektor ini menguntungkan. Dominasi tiga sektor tersebut dan dua subsektor dalam struktur ekonomi Kabupaten Jember memang mampu memberikan keuntungan struktural, namun dengan pengembangan lokasional yang tidak optimal justru merupakan beban dalam ekonomi Kabupaten Jember. Oleh karena itu pada masa mendatang harus dicarikan jalan yang lebih baik, agar pengembangan lokasional dapat memberikan manfaat untuk kedua sektor ini. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh Kabupaten Jember dari tiga sektor dan dua subsektor ini akan menjadi lebih berarti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Dalam hal ini tercermin dari peningkatan nilai PAD Kabupaten Jember yang meningkat cukup tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tabel 4.7). Kemampuan dalam penggalian sumber-sumber ekonomi semestinya diikuti dengan kebijakan pemerintah kabupaten yang mendorong perbaikan sarana dan prasarana serta tumbuh berkembangnya struktur ekonomi daerah karena jika dilihat dari keunggulan daerah, faktor yang paling menentukan adalah faktor lokasional dan hal itu tidak dapat diharapkan selamanya karena keunggulan komperatif daerah akan mengalami titik balik akibat *spread effect* dan *trickle down effect* pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Hal ini terlihat dari *total shift share* Kabupaten Jember pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berjalan lambat namun pasti menduduki rangking kedua setelah sektor pertanian (tanaman bahan makanan, peternakan dan hasil-hasilnya, perikanan) lihat tabel 4.8.
2. Sektor unggulan daerah sekarang ini kecuali subsektor tanaman perkebunan nampaknya masih dapat dipertahankan untuk masa mendatang. Bahkan ada empat sektor lain mungkin dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan di masa mendatang, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan serta sektor listrik, gas dan air bersih.
3. Keunggulan Kabupaten Jember terutama disebabkan oleh faktor lokasional. Nampaknya faktor ini sudah di manfaatkan dengan baik, namun masih ada sektor yang belum memperoleh manfaat daripadanya, yaitu sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi. Di masa mendatang perlu

disusun program yang lebih integratif agar kedua sektor ini pun dapat ikut serta menikmati keunggulan lokasional.

4. Pada Tanaman perkebunan yang memiliki nilai LQ statis paling besar dalam kontribusinya terhadap sektor pertanian dan PDRB Kabupaten Jember ternyata mengalami pergeseran yang cukup berarti, keunggulan Kabupaten Jember yang mempunyai keunggulan komperatif ternyata tidak mampu mendukung subsektor tanaman perkebunan dalam proses pertumbuhan sektor tersebut. Hal ini dapat dilihat dari nilai pertumbuhannya yang mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 1998 (lihat tabel 4.6) dan ditunjang oleh subsektor tanaman perkebunan di Jawa Timur yang mengalami kondisi yang sama (lihat lampiran 5).

5.2 Saran

1. Kelemahan yang dihadapi oleh Kabupaten Jember adalah kelemahan struktural. Dominasi beberapa sektor ternyata justru mengurangi kemanfaatan sektor lain, sementara sektor yang dominan tidak memberikan keuntungan yang dominan karena laju pertumbuhan sektor pertanian kalah dengan laju pertumbuhan sektor pertanian di daerah lain.
2. Adanya perencanaan yang terpadu antara pengembangan sektor ekonomi kabupaten dengan propinsi sehingga terjadi spesialisasi kerja akibat dari semakin besarnya keunggulan daerah.
3. Pada masa mendatang harus dicarikan jalan yang lebih baik, agar pengembangan lokasional dapat memberikan manfaat untuk sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh Kabupaten Jember dari kedua sektor tersebut akan menjadi lebih berarti.
4. Perlunya penelitian lebih lanjut terhadap subsektor-subsektor apakah dari sektor pertanian maupun sektor-sektor lain yang berpotensi sebagai pendorong bagi pembangunan sektor ekonomi di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : LPFE-UI.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Jember . 2000. *Jember dalam Angka*. Jember.
- Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur. 1999. *Jawa Timur dalam Angka*. Surabaya.
- Budiharsono, Sugeng. 1991. *Perencanaan Pembangunan Wilayah : Teori, Model Perencanaan dan Penerapannya*. Jakarta : PAU Ekonomi Universitas Indonesia.
- Dirjen DiktiDepdikbud RI.1993.*UUD 1945,P-4, GBHN Tap No : II/MPR/1993*, Jakarta.
- Kadaryah. 1982. *Ekonomi Perencanaan*. Jakarta : FE-UI.
- Nuryasman, MN. 1996. *Analisis Wilayah dan Teori Pusat Pertumbuhan*. Jakarta : LP3ES.
- Perroux, Francois.1964. " *Note On The Concept Of Growth Poles*", in David Lee, et all, *Regional Economic Theory and Practive*. New York: Free Press.
- Rahmawati, Elok Elita. 1998. *Analisis Potensi Sektoral sebagai Pendekatan Untuk Penetapan Prioritas Sektoral dalam Pembangunan Kabupaten Jember*, Skripsi tidak dipublikasikan . Jember: FE-UJ.
- Rietveld, Piet. 1985. *Economic Structure in Kabupaten Boyolali and Demak. Shift Share Analisis*. Seri lalap no.9. Salatiga :UPPW FE-UKSW.
- Supranto, J.1994. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:LP3ES.
- Warpani,S.1984. *Analisis Kota dan Daerah*. Bandung:ITB.
- Widodo.D.T.1999.*Analisis Penentuan Sektor Prioritas di Daerah Tingkat II Jawa Timur*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember:FE-UJ.
- Wijayanto, Bayu.1999. "*Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Boyolali 1993-1997*". Dian Ekonomi,No1/th V.pp.67-86. Salatiga:FE-UKSW.
- Yuwono, Prpto.1999. *Penentuan Sektor unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU.22/1999 daan UU 25/1999*.Kritis Vol XII No.2.Salatiga:FE-UKSW.

Lampiran 1. Produk Domestik Bruto Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan

tahun 1995-1999 (Juta Rupiah)

No	Sektor/Subsektor	1.995	1.996	1.997	1998*)	1999**)
1	Pertanian	8.028.436,70	8.150.374,09	8.108.890,95	8.080.244,99	8.280.127,91
2	Tanaman Perkebunan	1.614.700,24	1.837.424,94	1.992.631,24	1.527.057,75	1.491.946,28
3	Kehutanan	262.955,72	266.103,35	259.298,47	233.168,31	232.029,89
4	Pertambangan dan Pengalihan	970.066,58	982.419,95	875.522,36	501.798,67	483.149,93
5	Industri Pengolahan	15.802.744,63	17.698.276	19.409.565,66	15.104.078,20	15.064.191,66
6	Listrik, Gas dan Air bersih	1.011.891,73	1.139.846,68	1.143.104,30	1.179.294,65	1.332.448,19
7	Konstruksi	3.854.810,05	4.239.635,33	4.370.532,83	2.918.521,24	2.667.858,49
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11.866.746,64	12.993.706,42	13.828.696,97	11.369.207,36	11.722.811,23
9	Pengangkutan dan Komunikasi	3.800.166,09	4.162.807,67	4.236.276,08	4.051.086,25	4.443.028,71
10	Keuangan dan Persewaan dan Jasa	3.766.255,56	3.979.808,69	4.145.932,45	3.296.433,66	3.107.423,21
11	Jasa-Jasa	6.101.730,07	6.302.065,91	6.483.125,59	6.138.105,66	6.213.111,11
PDRB		57.080.504,01	61.752.469,03	64.853.576,90	54.398.996,74	55.038.126,61

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur

Keterangan :

*) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Lampiran 2. Location Quotient Masing-Masing Sektor Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jember Tahun 1995-1999

No	Sektor / Subsektor	LQ				
		1995	1996	1997	1998	1999
1	Pertanian	2,23835	2,22746	2,23764	1,99424	2,01659
2	Tanaman Perkebunan	4,63632	4,61375	4,63485	4,13068	4,17697
3	Kehutanan	0,73924	0,73564	0,73901	0,65862	0,66600
4	Pertambangan dan Penggalian	0,30420	0,30272	0,30411	0,27103	0,27406
5	Industri Pengolahan	0,26299	0,26171	0,26290	0,23431	0,23693
6	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,60949	0,60653	0,60930	0,54302	0,54911
7	Bangunan	0,63129	0,62821	0,63109	0,56244	0,56874
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,90157	0,89719	0,90129	0,80325	0,81225
9	Pengangkutan dan Komunikasi	0,90684	0,90242	0,90655	0,80794	0,81699
10	Keuangan, Persewahan Bangunan dan Jasa Perusahaan	0,96875	0,96404	0,96844	0,86310	0,87277
11	Jasa-Jasa	1,00540	1,00050	1,00508	0,89575	0,90579

Sumber : Data diolah

Lampiran 3 Dynamic Location Quation Masing-Masing Sektor Atas Dasar Harga Dasar Tahun 1996-1999
Kabupaten Jember

No	Sektor/Subsektor	Gin	Gi	1+gin/1+gn	1+G/1+G	DLQ
1	Pertanian	0,0304	0,0078	1,01163	1,01223	0,99763
2	Tanaman Perkebunan	-0,0822	-0,0086	0,90106	0,99577	0,67046
3	Kehutanan	-0,0265	-0,0298	0,95574	0,97442	0,92548
4	Pertambangan dan Penggalian	0,0015	-0,1400	0,98318	0,86373	1,67887
5	Industri Pengolahan	0,0080	-0,0020	0,98957	1,00240	0,94975
6	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,1121	0,0727	1,09181	1,07739	1,05459
7	Bangunan	-0,0698	-0,0719	0,91318	0,93220	0,92086
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,0561	0,0031	1,03684	1,00750	1,12168
9	Pengangkutan dan Komunikasi	0,0495	0,0415	1,03036	1,04607	0,94125
10	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	0,0172	-0,0409	0,99866	0,96324	1,15540
11	Jasa-jasa	0,0490	0,0051	1,02980	1,00953	1,08277

Sumber : Data diolah

Lampiran 4. Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar
Harga Konstan tahun 1995-1999 (dalam persen)

No	Sektor/Subsektor	1996	1997	1998	1999	rata-rata
1	Pertanian	8,33	2,48	1,30	0,07	0,0304
2	Tanaman Perkebunan	8,70	1,19	(39,68)	(3,08)	(0,0822)
3	Kehutanan	5,57	(20,89)	(4,24)	8,95	(0,0265)
4	Pertambangan dan Penggalian	0,90	0,38	(1,64)	0,95	0,0015
5	Industri Pengolahan	4,85	3,70	(6,76)	1,40	0,0080
6	Listrik, Gas dan Air Bersih	14,49	13,93	2,02	14,40	0,1121
7	Bangunan	3,58	2,03	(35,57)	2,02	(0,0698)
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,72	8,93	(0,25)	2,05	0,0561
9	Pengangkutan dan Komunikasi	7,85	7,22	2,97	1,77	0,0495
10	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	13,90	7,37	(2,91)	(11,47)	0,0172
11	Jasa-Jasa	6,57	5,04	6,57	1,40	0,0490
		8,71	4,54	(5,88)	0,05	0,0186

Sumber : Data diolah

Lampiran 5. Pertumbuhan Sektorial Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1996-1999
Jawa Timur (dalam persen)

No	Sektor/Subsektor	1996	1997	1998	1999	rata-rata
1	Pertanian	1,52	(0,51)	(0,35)	2,47	0,0078
2	Tanaman Perkebunan	13,79	8,45	(23,36)	(2,30)	(0,0086)
3	Kehutanan	1,20	(2,56)	(10,08)	(0,49)	(0,0298)
4	Pertambangan dan Penggalian	1,27	(10,88)	(42,69)	(3,72)	(0,1400)
5	Industri Pengolahan	11,99	9,67	(22,18)	(0,26)	(0,0020)
6	Listrik, Gas dan Air Bersih	12,65	0,29	3,17	12,99	0,0727
7	Bangunan	9,98	3,09	(33,22)	(8,59)	(0,0719)
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,50	6,43	(17,79)	3,11	0,0031
9	Pengangkutan dan Komunikasi	9,54	1,76	(4,37)	9,67	0,0415
10	Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan	5,67	4,17	(20,49)	(5,73)	(0,0409)
11	Jasa-Jasa	3,28	2,87	(5,32)	1,22	0,0051
		8,18	5,02	(16,12)	1,17	(0,0043)

Sumber : Data diolah

Lampiran 6. Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Jember ADH Konstan 2000 Th.1995- Th.2000
(dalam persen)

No	Sektor/Subsektor	1995	1996	1997	1998	1999
1	Pertanian	31,48	31,37	30,75	33,10	33,10
2	Tanaman Perkebunan	13,12	13,11	12,69	8,13	7,88
3	Kehutanan	0,34	0,33	0,25	0,25	0,28
4	Pertambangan dan Penggalian	0,52	0,48	0,46	0,48	0,49
5	Industri Pengolahan	7,28	7,02	6,97	6,90	6,99
6	Listrik, Gas dan Air bersih	1,08	1,14	1,24	1,34	1,54
7	Konstruksi	4,26	4,06	3,96	2,71	2,77
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,74	19,26	20,07	21,27	21,69
9	Pengangkutan dan Komunikasi	6,04	5,99	6,14	6,72	6,84
10	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,39	6,70	6,88	7,10	6,28
11	Jasa-Jasa	10,75	10,54	10,59	11,99	12,15
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data diolah



Lampiran 7. Kontribusi Sektoral PDRB Propinsi Jawa Timur ADH Konstan Tahun 2000
 Th. 1995-Th. 1999 (dalam persen)

No	Sektor/Subsektor	1995	1996	1997	1998	1999
1	Pertanian	14,07	13,20	12,50	14,85	15,04
2	Tanaman Perkebunan	2,83	2,98	3,07	2,81	2,71
3	Kehutanan	0,46	0,43	0,40	0,43	0,42
4	Pertambangan dan Penggalian	1,70	1,59	1,35	0,92	0,88
5	Industri Pengolahan	27,69	28,66	29,93	27,77	27,37
6	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,77	1,85	1,76	2,17	2,42
7	Konstruksi	6,75	6,87	6,74	5,37	4,85
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,79	21,04	21,32	20,90	21,30
9	Pengangkutan dan Komunikasi	6,66	6,74	6,53	7,45	8,07
10	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,60	6,44	6,39	6,06	5,65
11	Jasa-Jasa	10,69	10,21	10,00	11,28	11,29
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Data diolah